

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan¹. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan maka pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sependapat dengan (Siallagan, et al 2017) yang mengatakan Pemerintah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap, transparan serta memiliki kualitas yang baik. Syarat terpenuhinya laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah berkualitas atau memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan salah satunya dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk mengetahui pemerintahan itu berjalan baik atau tidak. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh organisasi yang bersangkutan (Munawir, 2010: 31). LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah tersebut sudah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Hal ini diperkuat oleh Hamonangan siallagan (2020) yang menyatakan “ baik buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah ini dapat dari opini yang diberikan oleh BPK”². Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Tabel 1. 1

Daftar Opini LKPD Kabupaten Toba Tahun 2014-2020

No	Tahun	Opini
----	-------	-------

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

² Hamonangan Siallagan (2020), Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi dan Kompetensi Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Medan). Jurusan Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen, Sumatera Utara, Indonesia

1	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

(Sumber: www.bpk.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat tahun 2014 dan 2015 pemerintah Kabupaten Toba memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, termasuk untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan. Dalam lima tahun terakhir Kabupaten Toba mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, termasuk untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan. Pemerintah Kabupaten Toba berhasil meraih secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Acara penyampaian opini dilaksanakan di Gedung BPK RI Perwakilan Sumatra Utara, di Jln. Imam Bonjol, Medan, Sumatra Utara, Jumat 16 April 2021. Pemerintah Kabupaten Toba menyerahkan LKPD un-audited TA 2020 tepatnya pada hari Rabu, 17 Februari 2021.

Pemeriksaan Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini, dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan berdasarkan kepada Kesesuaian penyajian dengan SAP, Efektivitas SPI, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang dan Kecukupan pengungkapan. Berdasarkan hal-hal tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dibahas dalam penelitian ini, faktor yang pertama itu adalah kompetensi sumber daya manusia. Laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin akuntansi." Menurut Bastian (2006) bahwa penyusunan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan". Sumber Daya Manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini

diperkuat oleh Hamonangan Siallagan (2020) yang mengemukakan bahwa kemampuan pegawai dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan logika akuntansi yang berlaku untuk menyusun laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Betapapun bagusnya SAP, tanpa didukung SDM yang handal, maka laporan keuangan yang berkualitas sulit dicapai. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas.

Selain kompetensi sumber daya manusia, Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu adanya sistem pengendalian intern. Tingkat kualitas suatu laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal dalam institusi pemerintah daerah itu sendiri. Sistem Pengendalian Internal sangat diperlukan dalam rangka pengembangan sumber daya yang efektif dan efisien, serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Instansi pemerintah juga wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Internal untuk mencapai visi dan misi serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah. Hal ini diperkuat oleh Hamonangan Siallagan (2022) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal dapat menjadi alat untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Lemahnya pengendalian internal yang dibangun dalam organisasi akan memberikan peluang bagi anggota organisasi untuk melakukan kecurangan³. Jika pengendalian internal tersebut lemah atau rendah maka dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu proses penyusunan laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh pemerintah daerah dari informasi/data akuntansi tidak akan kompeten.

Menurut Rizki Afri Mulia (2018) bahwa tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan pengendalian intern entitas itu sendiri⁴. Untuk mengatasi rendahnya kualitas laporan keuangan maka diharapkan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik dan benar. Kegiatan instansi pemerintah juga perlu adanya pemantauan secara terus-menerus dalam rangka memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko seperti pemborosan, penggelapan, dan penyalahgunaan. Dengan demikian, itu perlu adanya pengendalian internal untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas suatu instansi.

Selain kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern, Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan

³ Hamonangan Siallagan (2022), THE INFLUENCE OF INTERNAL CONTROL AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS ON FRAUD PREVENTION (A CASE ON KOPDIT CU PARDOMUAN PAKKAT) Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

⁴ Rizki Afri Mulia (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Ejournal

teknologi informasi. Berkembangnya teknologi informasi akan semakin memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Dengan adanya teknologi informasi yang sesuai dengan SAP maka akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan meminimalisir kesalahan pencatatan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya Pemanfaatan teknologi dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. Hal ini diperkuat oleh Hamonangan Siallagan (2022) pemanfaatan teknologi juga mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam hal keandalan dan ketepatan penyajian. Memanfaatkan seperangkat alat untuk membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyampaikan informasi dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah semakin cepat seiring dengan pemanfaatan teknologi. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan mengakibatkan informasi yang diberikan tidak kehilangan nilai. Penggunaan teknologi informasi secara optimal, secara langsung akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan tingkat akurasi yang tinggi dalam perhitungannya sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi informasi mampu mengurangi kesalahan yang bersifat material (Darwanis & Mahyani 2009).

Beberapa penelitian yang menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Antara lain oleh Surastiani & Handayani (2015)⁵ dengan menggunakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian tersebut adalah kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Salatiga. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurillah & Muid (2014), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian selanjutnya dilakukan Ramadhani (2018) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang sama dilakukan oleh Risky Yanti (2021)⁶, yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

⁵ Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 139–149.

⁶ Risky Yanti. 2021. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Kota Sibolga)

Hasil temuan diatas menunjukkan adanya inkonsisten hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian dengan topik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini dapat diteliti kembali agar mendapatkan hasil yang konsisten. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian TriYanti (2017). Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi dimana penelitian yang dilakukan TriYanti (2017) menggunakan dua variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern. Selain itu penambahan variabel independen yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah populasi dari penelitian ini.

Pada uraian yang dijelaskan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul " Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan mengenai Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah sehingga dapat diaplikasikan melalui teori dan praktek.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba, dapat memberikan manfaat sebagai masukan dan wawasan kepada pihak SKPD dalam mengembangkan pemahaman tentang kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan laporan keuangan daerah yang kualitas.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (2012) dalam Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa setiap laporan keuangan yang disusun merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap⁷. Pelaporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Semua laporan keuangan tersebut merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau entitas tertentu dalam suatu periode akuntansi tertentu yang biasanya digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan kinerja sebuah entitas atau perusahaan tersebut.

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan” (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Dalam sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Menurut Rahmadani (2015) tujuan umum suatu laporan keuangan khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja suatu entitas dalam proses pelaporan yang dapat digunakan oleh semua pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya⁸.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa entitas akuntansi merupakan unit pemerintah anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan⁹. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari

- 1) Pemerintah pusat

⁷ Ikatan Akuntan Publik Indonesia. 2012. *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta: Salemba Empat.

⁸ Rahmadani, S. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, 2(2), 1–15.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- 2) Pemerintah daerah;
- 3) Kementerian Negara/Lembaga dilingkungan pemerintah pusat
- 4) Bendahara Umum Negara.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan; dan (b) Laporan Kinerja.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Kriteria dan unsur- unsur kualitas atau nilai informasi dari laporan keuangan pemerintah telah ditentukan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ada empat macam karakteristik kualitas informasi keuangan yaitu:

- 1) Relevan,

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan (*predictive value*), dan memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*), serta informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi untuk pengambilan keputusan (*timeliness*)

- 2) *Reliable / Andal*

Keandalan informasi bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan informasi akan berbadan tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

- a) Dapat diverifikasi (*verifiable*)

Suatu informasi diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda dengan metode yang sama akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

- b) Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

- c) Penyajian secara wajar (*representation faithfulness*)

Mengaambarkan keadaan secara wajar dan lengkap, menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan apabila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4) Dapat dipahami.

Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa entitas akuntansi merupakan unit pemerintah anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan¹⁰. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari

- 5) Pemerintah pusat
- 6) Pemerintah daerah;
- 7) Kementerian Negara/Lembaga dilingkungan pemerintah pusat
- 8) Bendahara Umum Negara.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan; dan (b) Laporan Kinerja.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan

Dalam rangkai pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tiap kepala SPKD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya. Laporan keuangan tersebut akan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71, komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran Lebih
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Arus Kas
- f) Laporan Perubahan Ekuitas
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

2.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Nomor 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Disamping laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Seperti yang

kemudian dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Informasi tambahan seperti laporan non keuangan, dapat menunjang pemenuhan tujuan laporan keuangan. Laporan non keuangan dapat dilaporkan secara bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Menurut Mardismo secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:

- a. Kepatuhan dan pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
- b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
- c. Perencanaan dan Informasi Otoritas (*Planning and Authorization Information*)
- d. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
- e. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

f. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Fact and Figures*)¹¹

2.1.5 Fungsi Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh setiap entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui posisi keuangan dan sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah mereka lakukan serta hasil yang sudah dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Evaluasi Kinerja, Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.6 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

¹¹ Mardiasmo. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi Keempat: Andi, Yogyakarta, 2009

Indikator Kualitas Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang meliputi:

1. Relevan Suatu laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam membantu mengevaluasi kejadian masa lalu atau masa kini serta memprediksi masa depan, dan mengoreksi hasil evaluasi. Informasi yang relevan mengandung beberapa unsur yaitu meliputi:
 - a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Artinya bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk menegaskan atau mengoreksi peristiwa di masa lalu.
 - b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Artinya bahwa informasi tersebut dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu Artinya bahwa informasi tersebut disajikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap Memiliki arti bahwa informasi keuangan yang disajikan selengkap mungkin agar memudahkan pengguna yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
2. Andal Keandalan suatu informasi tergantung pada kemampuan informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman ada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi. Informasi yang andal mencakup unsur-unsur berikut:
 - a) Penyajian jujur Penyajian yang jujur menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan juga harus bebas dari unsur bias.
 - b) Dapat diverifikasi Artinya bahwa apabila kemampuan informasi tersebut diuji oleh orang yang berbeda, namun dengan menggunakan metode yang sama, maka akan menghasilkan hasil akhir yang sama.
 - c) Netralitas Artinya bahwa di dalam penyajian laporan keuangan tidak ada unsur bias. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan Suatu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan dapat berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan tersebut dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, sedangkan perbandingan secara eksternal dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Jika entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang, maka perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami Dapat dipahami artinya bahwa suatu informasi yang disajikan di laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Berdasarkan hal tersebut, maka pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dalam lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peran yang penting dalam menentukan kemajuan suatu entitas. Faktor penentu dalam hal ini bukanlah kuantitas sumber daya manusia tersebut, namun kualitasnya sebagai individu. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi akan dapat menunjang kinerja suatu organisasi sehingga dapat mengalami kemajuan, oleh karena itu sumber daya manusia yang bekerja baik di suatu entitas pada umumnya diterima melalui proses seleksi terlebih dahulu. Menurut Martindas (2002: 89), sumber daya manusia merupakan satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Jadi manusia merupakan unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi, oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal sehingga tujuan organisasi tercapai¹².

Menurut Nawawi (2005: 37) membagi pengertian sumber daya manusia dari dua sudut pandang yaitu secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk atau warga di suatu negara atau wilayah tertentu yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja)¹³. Pengertian sumber daya manusia dalam arti mikro adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset suatu organisasi

¹² Martindas. (2002). *Manajemen SDM Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan, dan Usaha*. Jakarta: Grafiti.

¹³ Nawawi, Hadari. (2005). *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

yang dapat dihitung jumlahnya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah semua orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan di dalam sebuah lembaga/organisasi, dimana orang tersebut berfungsi sebagai aset yang dapat dihitung jumlahnya.

2.2.2 Tipe Kompetensi Sumber Daya Manusia

Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, dan beberapa tipe kompetensi tersebut menurut Wibowo (2013:97) beberapa tipe kompetensi sumber daya manusia di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Planning Competency**, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
2. **Influence Competency**, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional.
3. **Communication Competency**, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.
4. **Interpersonal Competency**, meliputi empati, pembangunan konsensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi team player.
5. **Thinking Competency**, berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analisis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.
6. **Organizational Competency**, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.
7. **Human Resources Management Competency**, merupakan kemampuan dalam bidang team building, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.
8. **Leadership Competency**, merupakan kompetensi yang meliputi kecakapan dalam memosisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan mempelopori kesehatan tempat kerja.

9. Client Service Competency, merupakan kompetensi yang berupa pengidentifikasian dan penganalisaan pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.
10. Business Competency, merupakan kompetensi yang meliputi manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.
11. Self Management Competency, kompetensi yang berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.
12. Technical/Operasional Competency, kompetensi yang berkaitan dengan: mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.

Menurut Michael Zwell memberikan lima kategori kompetensi (2013:330), yang terdiri dari:

1. Task achievement merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.
2. Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi berhubungan dengan relationship meliputi: kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antarpribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.
3. Personal attribute merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.
4. Managerial merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi managerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

5. Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi: kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun fokus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai¹⁴.

2.2.3 Manfaat Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Ruky (2013:107) mengatakan bahwa terdapat berbagai alasan dan manfaat kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut ¹⁵:

1. Memperjelas standar kerja dan arahan yang ingin dicapai Keterampilan, pengetahuan dan karaktersitik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Dan perilaku apa saja yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja.
2. Alat seleksi karyawan Penggunaan kompetensi sebagai alat seleksi karyawan dalam organisasi untuk memilih calon karyawan terbaik yaitu diharapkan adanya kejelasan perilaku dari karyawan, sasaran yang efektif, memperkecil biaya rekrutmen.
3. Memaksimalkan produktivitas Mencapai karyawan bila dikembangkan untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilan sehingga mampu maksimal dalam bekerja.
4. Dasar pengembangan sistem remunerasi Untuk mengembangkan sistem remunerasi akan terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu perilaku yang diharapkan dan yang ditampilkan dari seorang karyawan.
5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan Untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah.
6. Menyelesaikan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi Untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

2.2.4 Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya adalah tolak ukur yang dapat dijadikan patokan atau perbandingan agar bisa mengetahui sumber daya yang

¹⁴ *Ibid*, hlm 330 - 331

¹⁵ Ruky, S. Achmad. 2013. Sistem Manajemen Kinerja. cetakan Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

berkualitas. Dengan adanya batasan atau tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi sumber daya manusia¹⁶.

Menurut Sedarmayanti (2014:286) menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari¹⁷:

1. Pengetahuan (*knowledge*), mencakup pengetahuan standar akuntansi pemerintahan, pengetahuan mengenai kegiatan instansi yang berhubungan dengan keuangan dan pengetahuan perkembangan teknologi informasi dalam akuntansi.
2. Keterampilan (*skill*), mencakup keterampilan mengenai fungsi akuntansi untuk setiap transaksi, keterampilan berorganisasi, dan keterampilan komunikasi yang efektif.
3. Sikap (*attitude*), memiliki komitmen untuk kepentingan publik dan sensitivitas terhadap tanggung jawab sosial, pengembangan diri dan belajar serta terus menerus, dapat diandalkan, bertanggungjawab, tepat waktu dan saling menghargai, menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

2.2.5 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Wian Fauzi (2019) pengukuran kompetensi sumber daya manusia berdasarkan tiga item indikator, yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)
 - a) Tingkat pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan
 - b) Tingkat pemahaman mengenai kegiatan instansi yang berhubungan dengan keuangan
 - c) Tingkat pemahaman mengenai perkembangan teknologi informasi dibidang akuntansi
2. Keterampilan (*skill*)
 - a) Tingkat keterampilan mengenai fungsi akuntansi untuk setiap transaksi
 - b) Tingkat keterampilan dalam berorganisasi

¹⁶ Wian Fauzi (2019) *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknolog Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung (Survey pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung)*. Skripsi(S1) thesis,

¹⁷ Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen pegawai Negeri Sipil Edisi Revisi*. Bandung: PT Reflika Aditama.

c) Tingkat keterampilan yang dimiliki mengenai komunikasi yang efektif

3. Sikap perilaku (*Attitude*)

- a) Tingkat kemampuan pegawai yang mengutamakan kepentingan public
- b) Tingkat pegawai yang dapat diandalkan dalam bertugas
- c) Tingkat pegawai yang dapat bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan
- d) Tingkat kemampuan pegawai yang Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan
- e) Tingkat pegawai yang Memiliki sikap saling menghargai
- f) Tingkat pegawai yang diberikan pelatihan pengembangan diri
- g) Tingkat pegawai yang Mengikuti hukum maupun peraturan yang berlaku

Menurut Risky Yanti (2021) indikator pengukuran kompetensi sumber daya manusia ada lima, yaitu:

1. Kemampuan dan pemahaman terhadap standar
2. Pengetahuan dalam bidang akuntansi
3. Kemampuan terhadap peraturan
4. Pendidikan dan pelatihan
5. SDM Memiliki pengalaman

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Khoirina (2018) pengukuran kompetensi sumber daya manusia berdasarkan empat item indikator, yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
 - a) memiliki pemahaman terhadap peraturan dan standar pelaporan keuangan mempengaruhi kualitas informasi dari laporan keuangan
 - b) memahami pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi dengan baik
 - c) memahami Peraturan No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan baik

2. Keahlian dan Kemampuan (*Skill*)

- a) mampu membuat jurnal untuk setiap transaksi dengan benar
- b) mampu posting jurnal ke dalam buku besar
- c) mampu menyusun dan menyajikan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan baik

3. Perilaku (*Attitude*)

- a) memiliki interaksi dengan sistem akuntansi yang ada dan akan mempengaruhi kualitas informasi dari laporan keuangan
- b) selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan
- c) selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan

4. Tanggung Jawab

- a) mengerti sumber daya pendukung operasional yang cukup dan memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas
- b) telah menjalankan peran dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Indra Bastian (2007: 7), Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi¹⁸.

Sistem Pengendalian Internal sangat diperlukan dalam rangka pengembangan sumber daya yang efektif dan efisien, serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Instansi pemerintah juga wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Internal untuk mencapai visi dan misi serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah. Kegiatan instansi pemerintah juga perlu adanya pemantauan secara terus-menerus dalam rangka memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko seperti pemborosan, penggelapan, dan

¹⁸ Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

penyalahgunaan. Dengan demikian, itu perlu adanya pengendalian internal untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas suatu perusahaan/instansi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa: "Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah".

Menurut I Gusti Agung Rai (2008: 283), Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu kebijakan serta prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuannya¹⁹. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh suatu organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi mengenai keandalan laporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui²⁰:

- a) penegakan integritas dan nilai etika;
- b) komitmen terhadap kompetensi;
- c) kepemimpinan yang kondusif;
- d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

¹⁹ I Gusti Agung. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

²⁰ Risky (2021), analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kota Sibolga)

- f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam

suatu entitas adalah:

1. Nilai integritas dan etika

Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya;

2. Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing organisasi dalam instansi pemerintah.

3. Filosofi dan gaya operasi manajemen

Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan;

4. Struktur organisasi

Kerangka kerja bagi manajemen; dalam perencanaan, pengarahan, dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi;

5. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Satuan usaha membatasi garis Lingkungan Pengendalian

2.3.3 Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas: (a) identifikasi risiko; dan (b) analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: (a) tujuan Instansi Pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang

bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

2.3.5 Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib dilakukan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: (a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan (b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

2.3.6 Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2.3.7 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Fierda Pangestika (2016) Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengendalian Internal, yaitu²¹ :

1. Lingkungan pengendalian

²¹ Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

2. Penaksiran risiko
3. Informasi dan komunikasi
4. Aktivitas pengendalian
5. Pemantauan

Menurut Rizky Yanti (2021) indikator Sistem Pengendalian Internal ada empat, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Khoirina (2018) pengukuran Sistem Pengendalian Internal berdasarkan lima item indikator, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
 - a) Pimpinan telah menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai
 - b) Struktur organisasi OPD telah menggambarkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pegawai
 - c) Pimpinan OPD selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau perilaku pegawai
 - d) Pimpinan OPD secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern
2. Penilaian Resiko
 - a) Pimpinan telah melakukan analisis resiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi
 - b) Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi resiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi
3. Kegiatan Pengendalian
 - a) Prosedur otorisasi dokumen transaksi yang baik akan berpengaruh pada kualitas informasi yang dihasilkan

- b) Ketepatan input dan/atau posting data berpengaruh pada kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan
- c) Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi

- a) Telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi untuk melaksanakan tanggung jawab
- b) Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat
- c) Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan

5. Pemantauan

- a) Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, OPD telah melakukan perbaikan pengendalian intern
- b) Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.

2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.4.1 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer (Sutarman 2012:13)²². Sutabri (2012:3) menyatakan bahwa “Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambil keputusan.

Mulyadi (2014: 21) menyatakan bahwa definisi teknologi informasi adalah sebagai berikut: “Teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan

²² Sutarman. 2014. Buku Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara.

telekomunikasi.²³ Definisi teknologi informasi menurut Kadir dan Triwahyuni (2013: 10) adalah sebagai berikut: “Teknologi informasi adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar”²⁴.

Beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Sutarman (2012:17), mengemukakan tujuan dari teknologi informasi adalah:

1. Untuk memecahkan masalah
2. Untuk membuka kreativitas dan
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Fungsi teknologi informasi menurut Sutarman (2012:18) menyatakan bahwa:

1. Menangkap (Capture)
2. Mengolah (Processing) Mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.
 - a) Data processing, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi.
 - b) Information processing, suatu aktivitas komputer yang memproses dan mengolah suatu tipe atau bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe atau bentuk dari informasi.
 - c) Multimedia system, suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai tipe atau bentuk dari informasi secara bersamaan.
3. Menghasilkan (Generating) Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya: laporan, tabel, grafik, dan sebagainya.

²³ Mulyadi. 2014. Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

²⁴ Kadir, Abdul dan Terra CH. Triwahyuni. (2013). Pengenalan Teknologi Informasi. Andi. Yogyakarta

4. Menyimpan (Storage) Merekam atau menyimpan dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke harddisk, tape, disket, compact disc (CD) dan sebagainya.
5. Mencari kembali (Retrieval) Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (copy) data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya.
6. Transmisi (Transmission) Mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya dan sebagainya.

2.4.3 Peranan Teknologi Informasi

Menurut Kadir (2014:12), peranan teknologi informasi adalah:

1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

2.4.4 Pengelompokan Teknologi Informasi

Menurut Kadir (2014:11) membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu:

1. Teknologi masukan (input technology)

Segala perangkat yang digunakan untuk mengangkat data/informasi dari sumber asalnya yang terdiri dari mouse, keyboard dan scanner.

2. Teknologi keluaran (output technology)

Supaya informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam monitor. Namun kadangkala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas (hardcopy). Pada keadaan seperti ini, printer berperan dalam menentukan kualitas cetakan. Dewasa ini, terdapat berbagai peran yang mendukung penyajian informasi, termasuk dalam suara.

3. Teknologi perangkat lunak (software technology)

Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau seringkali disebut program. Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer.

4. Teknologi penyimpan (storage technology)

Teknologi penyimpanan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data.

5. Teknologi komunikasi (telecommunication technology)

Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh.

6. Mesin pemroses (processing machine)

Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program (berupa komponen/memori) dan mengeksekusi program (berupa komponen CPU).

2.4.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa (KBBI) dalam <http://kbbi.web.id/> pengertian pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Menurut Wilkinson (2014) pengertian pemanfaatan teknologi informasi adalah: "Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal".

Menurut Jogiyanto (2009:3), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah: "Pemanfaatan dalam komponen-komponen teknologi informasi berbasis komputer, yang terdiri dari: perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, data dan komunikasi data."

2.4.6 Karakteristik Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berikut penjabaran menurut jogiyanto (2009:3) tentang dimensi dari pemanfaatan teknologi informasi pada komponen-komponen teknologi informasi berbasis komputer, yaitu:

1. Perangkat keras komputer adalah alat pengolahan data yang bekerja secara elektronik dan otomatis. Sistem perangkat komputer terdiri dari empat unsur utama dan satu unsur tambahan. Keempat unsur utama itu adalah Input unit, Central Processing unit (CPU), Storage/memori dan Output Unit. Sedangkan yang merupakan unsur tambahan adalah Communication Link.

2. Perangkat lunak komputer adalah komponen-komponen dalam sistem pengolahan data yang berupa program-program untuk mengontrol kerja sistem komputer. Pada umumnya istilah perangkat lunak berhubungan dengan cara-cara untuk menghasilkan hubungan yang lebih efisien antara manusia dan mesin komputer. Fungsi perangkat lunak komputer antara lain adalah mengidentifikasi program komputer dan menyiapkan aplikasi program komputer sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer menjadi terkontrol serta mengatur dan membuat pekerjaan yang berkaitan dengan komputer lebih efisien.
3. Data dan komunikasi data. Data merupakan fakta-fakta atau pengamatan-pengamatan mengenai orang maupun tempat kejadian. Komunikasi data adalah suatu perkawinan antara pengolahan data dan transmisi data. Komunikasi data merupakan penggerak data dan informasi yang dikodekan dari satu titik ke titik lain melalui peralatan listrik atau elektromagnetik kabel serat optic atau sinyal gelombang mikro.”

2.4.7 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Tjhay dalam (dalam syahroni, 2014) pengukuran pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan tiga item indikator, yaitu:

1. Intensitas Pemanfaatan

Minat (intention) atau Intensitas pemanfaatan yang tinggi terhadap penggunaan teknologi sistem informasi akan menumbuhkan perilaku yang menunjang pemanfaatan teknologi sistem informasi.

2. Frekuensi Pemanfaatan Pengukuran penggunaan sesungguhnya (actual use) diukur sebagai jumlah waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu teknologi dan besarnya frekuensi penggunaannya²⁵.
3. Jumlah Aplikasi atau Perangkat Lunak yang digunakan

Program yang secara khusus digunakan untuk mendukung aplikasi khusus untuk para pemakai seperti aplikasi untuk bisnis, aplikasi untuk pendidikan, aplikasi multimedia, dan aplikasi lainnya yang digunakan sesuai dengan bidangnya.

Menurut Wian Fauzi (2019) pengukuran sistem pengendalian internal berdasarkan tiga item indikator, yaitu:

1. Perangkat keras computer

²⁵ Khoirul Habib Syahroni. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kesesuaian Tugas - Teknologi Informasi, Dan Kepercayaan Atas Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual. Jurnal akuntansi dan bisnis. Vol 4.

- a) Banyaknya Alat pengelolaan data yang digunakan oleh instansi secara otomatis
- b) Banyaknya stok untuk mengganti Input unit yang rusak
- c) Banyaknya Storage/memory yang dimiliki instansi untuk menyimpan dokumen
- d) Banyaknya stok Output unit untuk mengganti yang rusak
- e) Banyaknya stok CPU untuk mengganti yang rusak
- f) Banyaknya Communication link yang digunakan oleh instansi untuk pemakaian tertentu

2. Perangkat lunak computer

- a) Banyaknya Kemampuan dalam sistem pengelolaan data yang berupa program-program untuk mengontrol kerja sistem Komputer
- b) Mengidentifikasi program computer
- c) Banyaknya aplikasi yang digunakan untuk menyiapkan program computer

3. Data dan komunikasi data

- a) Banyaknya Fakta atau pengamatan mengenai orang atau tempat kejadian untuk memberikan informasi
- b) Banyaknya Elektronik kabel serat optic/sinyal gelombang mikro

Indikator penelitian ini berdasarkan Khoirina (2018) menyatakan bahwa indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Komputer

- a) Pengelola keuangan/akuntansi telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas
- b) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- c) Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d) Terdapat sistem keamanan komputer (antivirus) dan menerapkan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur

2. Jaringan Internet

- a) Pengelola keuangan/akuntansi telah memanfaatkan jaringan internet di unit sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan
- b) Jaringan internet di OPD tempat saya bekerja selalu dalam kondisi yang baik/lancar untuk digunakan

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sehubungan dengan penelitian ini adalah dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2015) menggunakan kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan koefisien determinasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif, terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2021) menggunakan kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi daerah sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pegawai yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan koefisien determinasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi daerah berpengaruh signifikan positif, terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Siti Soimah (2014) meneliti tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4. Grani (2018) meneliti tentang Pengaruh Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Bantul. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari jawaban yang berasal dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber daya berpengaruh negatif sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Pengendalian Intern Penerapan Standar Akuntansi Sistem Keuangan Daerah berpengaruh Positif.
5. Khoirina (2018) meneliti tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pememerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Rizki Afri Mulia (2018) meneliti tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel independen dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Yendrawati (2013) melakukan penelitian dengan variabel dependen kualitas informasi laporan keuangan, sedangkan variabel independennya yaitu sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia serta faktor eksternal sebagai variabel moderating. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada semua pengelola keuangan pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan variabel faktor eksternal dapat memoderasi pengaruh dari sistem pengendalian intern tersebut. Sedangkan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, akan tetapi faktor eksternal tidak dapat memoderasi pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

8. Nurillah (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM, penerapan sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
9. Triyanti (2017) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Akuntansi Dan sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
10. Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi. Keuangan Daerah berpengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
11. Fadila Ariesta (2013) Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). Hasil penelitian menunjukkan Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
12. Surastiani, D. P., & Handayani, B. D (2015) Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Intern sebagai variabel independen dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Variabel Dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Salatiga.

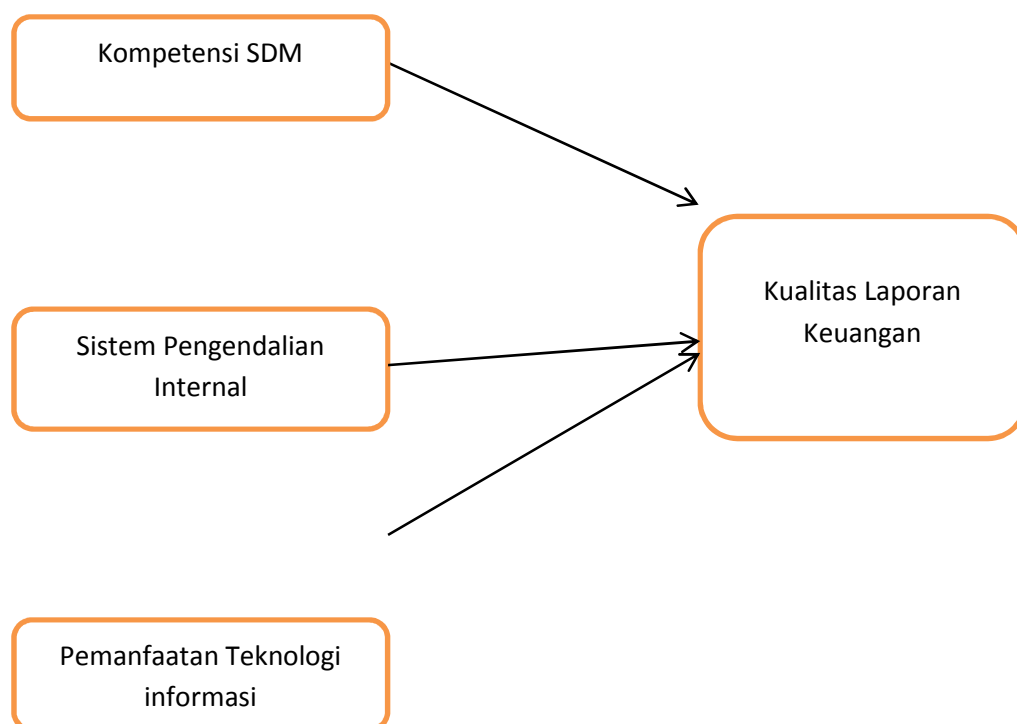
2.6 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.6.1 Kerangka Konseptual

Penelitian bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan daerah terhadap variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dikemukakan tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan kompetensi sumber daya manusia untuk menyusun laporan keuangan, adanya dukungan sistem pengendalian intern yang baik, adanya teknologi yang mendukung.

Berdasarkan uraian tersebut maka adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka konseptual



2.6.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian

1. **Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sumber daya manusia (SDM) adalah seorang atau individu yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Menurut Bastian (2006) bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan". Sumber Daya Manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Betapapun bagus SAP, tanpa didukung SDM yang handal, maka laporan keuangan yang berkualitas sulit dicapai. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia yang handal sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Penelitian ini dilakukan oleh Grani Ramadhani (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Bantul²⁶. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nurillah & Muid (2014), yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Depok. Dari kedua penelitian tersebut terlihat adanya inkonsisten hasil²⁷.

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H1: *Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*

2. Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses yang terstruktur atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai yang dilaksanakan secara terus menerus agar memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Hamonangan Siallagan (2022) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal dapat menjadi alat untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Lemahnya pengendalian internal yang dibangun dalam organisasi akan memberikan peluang bagi anggota organisasi untuk melakukan kecurangan. Dengan pengendalian internal, aset organisasi akan terlindungi, pelaporan keuangan perusahaan dapat dipercaya, risiko kerugian dapat dikurangi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan akan meningkat. Semakin tinggi efektivitas pengendalian intern yang dimiliki oleh suatu instansi maka semakin rendah kecurangan yang akan terjadi (Hamonangan Siallagan

²⁶ Grani Ramadhani (2018), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Study Empiris Pada SKPD Kabupaten Bantul)

²⁷ Nurillah & Muid (2014), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).

2020). SPI dilakukan agar tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal. Dengan demikian, suatu instansi harus memiliki pengendalian internal yang efektif agar semua kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh instansi tersebut dipatuhi oleh seluruh pegawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Afri Mulia menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. juga menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Yanti menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah²⁸.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis kedua dapat dirumuskan yaitu:

H2: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pemanfaatan teknologi informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi oleh SKPD dalam penyusunan laporan keuangan akan memberikan keyakinan yang memadai kepada stakeholder. Karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan, kualitas laporan keuangan akan meningkat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan dimanfaatkannya teknologi, keterbukaan informasi akan sangat mudah didapatkan, cepat, tepat dan mampu dengan mudah dikelola atau diolah serta mempermudah proses dan meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan apabila dalam hal ini tidak dilakukannya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan tugas/kegiatan organisasi (Hamonangan Siallagan 2020). Penggunaan teknologi informasi secara optimal, secara langsung akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan tingkat akurasi yang tinggi dalam perhitungannya sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi informasi mampu mengurangi kesalahan yang bersifat material (Darwanis & Mahyani 2009).

Penelitian tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Surastiani & Handayani (2015). Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Salatiga. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Ramadhani (2018) pada SKPD

²⁸ Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. (2015) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (pada SKPD Kota Salatiga)

Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari kedua penelitian tersebut ditemukan adanya inkonsisten hasil.

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen. Sugiyono menyatakan bahwa variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)²⁹. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) dan variabel independen adalah Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3).

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Umar mengemukakan bahwa: **“Dersain kausal berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu dengan yang lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya”**³⁰. Dengan penelitian ini maka dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

3.3 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan dan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Toba, dengan cara menyebarkan kuesioner kepada bagian pegawai akuntansi/keuangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Toba. Alasan penelitian ini dilakukan di SKPD Pemerintah Kabupaten Toba karena ingin memperoleh gambaran dan bukti empiris tentang Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

3.4 Defenisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) dan variabel independen kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3).

²⁹ sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Penerbit: Alfabeta. Bandung. 2010, hal 39

³⁰ Husen Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis**. Edisi kedua: Rajawali Pers. Jakarta, 2008

Tabel 3. 1
Defenisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki manfaat umpan balik • Memiliki manfaat prediktif • Tepat waktu • Lengkap 2. Andal <ul style="list-style-type: none"> • Penyajian jujur • Dapat diverifikasi • Netralitas 3. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 4. Keuangan dapat dipahami sesuai SAP
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	Sumber daya manusia merupakan kemampuan setiap individu maupun kelompok dalam suatu organisai untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (Khoirina 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki pemahaman terhadap peraturan dan standar pelaporan keuangan 2. memahami pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi dengan baik 3. memahami Peraturan No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan baik 4. Pengetahuan dan keahlian

		<p>dalam bidang akuntansi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kemampuan terhadap peraturan 6. menjalankan peran dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan
Sistem Pengendalian Intern (X2)	<p>Sistem pengendalian intern memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi pemerintah. Dengan adanya pengendalian internal yang baik dalam sebuah organisasi maka akan kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. (Khoirina 2018)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan
Pemanfaatan Teknologi dan Informasi (X3)	<p>Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer (Sutarman 2012:13)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola keuangan/akuntansi telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas 2. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi 3. Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur 5. memanfaatkan jaringan internet 6. Jaringan internet selalu dalam kondisi yang

		baik/lancar untuk digunakan
--	--	-----------------------------

3.5 Populasi dan Sampel

Sugiyono mengemukakan “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya³¹. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di beberapa SKPD yang terdiri dari: 1 DPRD, 1 Inspektorat, 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 1 Pemberdayaan Masyarakat Desa, 6 Dinas (Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan).

Pengambilan sampel terhadap responden dalam penelitian ini didasarkan pada metode *purposive sampling*. Metode ini digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari kriteria tertentu berdasarkan pertimbangan yang sengaja dipilih peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara, dan staff penatausahaan keuangan di beberapa SKPD di Kabupaten Toba. Adapun Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada setiap SKPD Kabupaten Toba yang terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan, yang meliputi bagian keuangan, bendahara.
2. Pegawai/Staff bagian akuntansi yang disebut Pembantu Pejabat Penatausahaan keuangan SKPD (Pembantu PPK-SKPD).
3. Memiliki masa kerja minimal 3 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

Pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah bagian keuangan, dan para staf yang terlibat dalam penyusunan pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Toba. Berdasarkan kriteria tersebut, adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yang masing-masing SKPD ada 4 (empat) orang responden.

3.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut sugiyono “**Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data³²**”. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud perolehan langsung dari instansi pemerintah

³¹ Sugiyono, **Op.Cit.**, hal. 80

³² Sugiyono. **Metode Penelitian Pendidikan**. Edisi Revisi: 15. Alfabeta: Bandung .2010

daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan sumber informasi penelitian.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden untuk mengisi kuesioner. Daftar pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terstruktur dan responden tinggal memberi tanda *checklist*. Pemberian skor terhadap butir-butir pernyataan diukur menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rentang nilai 1-4 dengan perincian sebagai berikut:

Angka 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2: Tidak Setuju (TS)

Angka 3: Setuju (S)

Angka 4: Sangat Setuju (SS)

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Beberapa teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

3.8.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu variable terkait fungsinya, dan digunakan untuk menunjukkan sah atau tidaknya kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian. Pengujian dengan menggunakan uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Pearson Correlation* dengan r tabel. Nilai r tabel yang dipakai adalah nilai dengan signifikan 5% (0,05).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawabannya dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu³³. Untuk menguji reliabilitas digunakan pengujian *croanbach alpha*, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Kurang dari 0,6 tidak reliabel

³³ Westriningsih.2012. *SPSS 20*. Penertbit Andi

- b) 0,6 – 0,7 akseptabel
- c) 0,7 – 0,8 baik
- d) Lebih dari 0,8 reliabel

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi, pengujian ini meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Data yang baik adalah yang mempunyai pola seperti distribusi normal (tidak mencong ke kiri atau ke kanan)³⁴. Pada penelitian ini, uji normalitas sebaran data dilakukan dengan membandingkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan kriteria pengujian yang dapat dilihat pada tingkat signifikansi data. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika nilai *Sig* > α 0.05 maka dikatakan berdistribusi normal
- b) Jika nilai *Sig* < α 0,05 maka dikatakan berdistribusi tidak normal

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolienaritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)³⁵. Menurut Ghozali pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat kerelasi antara variable independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) > 10 dan *tolerance* > 10. Jika *tolerance* value dibawah 0,10, maka terjadi gejala multikolonearitas.

3. Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastitas bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya dengan menggunakan uji Grafik *Scatter Plot* yang terdapat dalam program *SPSS 25.0 for window*. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Konsekuensi dari heteroskederitas yaitu, jika terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskederitas, sehingga model regresi layak digunakan berdasarkan masukan variabel X terhadap Y.

³⁴ Enterprise, Jubilee. 2018. **SPSS Komplet Untuk Mahasiswa**. Jakarta. Kompas Gramedia

³⁵ Husein Umar, **Op.Cit.**, hal 177

3.9 Metode Analisis Data

Sebuah data yang dianggap valid dan reliable, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu *software SPSS 25*. Seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Uji Regresi Berganda

Alat uji yang digunakan adalah *Regresi Linear Berganda*. Uji digunakan karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

X1 = Sumber Daya Manusia

X2 = Sistem Pengendalian Intern

X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

ε = Error

2. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati 0 maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap dependen.

3.10 Pengujian Hipotesis

1. Uji T

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang di estimasi, maka digunakan *t persial*. Dengan kriteria pengujian:

- a) Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka hipotesis di terima yang berarti tersedia cukup bukti untuk mengetahui H_0 pada pengujian hipotesis 1, 2 dan 3 atau dengan kata lain tersedia bukti menerima H_a pada hipotesis 1, 2 dan 3.
- b) Jika tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis di tolak dan berarti tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis.
- c) Jika tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis di tolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

Selain kriteria tersebut, untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dan koefisien positif dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ berarti H_a ditolak dan H_0 diterima.